

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Pelaporan Keuangan**

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Agar laporan keuangan dapat menyediakan informasi yang berguna untuk pembuatan keputusan oleh banyak pengguna, maka KDPPLK mengharuskan informasi yang dimuat di dalamnya memiliki efektivitas dapat dipahami, relevan, andal dan dapat dibandingkan.

Penjabaran efektivitas kualitatif menurut Darminto dan Juliaty (2005) adalah sebagai berikut:

1. **Dapat dipahami**

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Walaupun informasi tersebut kompleks, bukan alasan untuk tidak memasukkan informasi tersebut dalam laporan keuangan.

2. **Relevan**

Informasi memiliki kualitas relevan jika informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan atau

mengkoreksi, hasil evaluasi di masa lalu. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai yang diambil atas dasar laporan keuangan.

### 3. Andal

Informasi yang memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat disajikan.

### 4. Dapat Dibandingkan

Pemakai laporan keuangan harus dapat membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi keuangan dan kinerja perusahaan.

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pengguna dalam proses pengambilan keputusan dan harus dapat diandalkan.

Keandalan laporan keuangan meliputi ciri-ciri yaitu:

1. Penyajian jujur
2. Netralitas
3. Substansi mengungguli bentuk
4. Pertimbangan sehat, dan
5. Kelengkapan.

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan mengharuskan pos-pos yang memenuhi suatu unsur yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, kinerja dan beban harus diakui, jika ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam perusahaan (Wahyuni, 2012).

## **2.2 Aset Takberwujud**

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 19, menyatakan bahwa aset takberwujud aset nonmoneter teridentifikasi tanpa wujud fisik. Untuk dapat memenuhi definisi aset, suatu pos harus memiliki tiga kriteria yaitu :

1. keteridentifikasian,
2. adanya pengendalian sumber daya
3. adanya manfaat ekonomis di masa depan. (Wahyuni, 2012)

Di dalam PSAK 19, mengatur definisi dari aset yang tidak teridentifikasi yang dinyatakan bahwa suatu aset dikatakan teridentifikasi jika:

1. dapat dipisahkan, yaitu dapat dipisahkan atau dibedakan dari entitas dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan, ditukarkan, baik secara individual atau bersama dengan kontrak terkait, aset teridentifikasi, atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut; atau
2. timbul dari hak kontraktual atau hak hukum lain, terlepas apakah dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak dan kewajiban lain.

Entitas sering kali mengeluarkan sumber daya maupun menimbulkan liabilitas dalam perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya takberwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, hak kekayaan intelektual, pengetahuan mengenai pasar dan merek dagang. Contoh umum lainnya adalah piranti lunak komputer, daftar pelanggan, hak pelayanan jaminan, hubungan dengan pemasok atau pelanggan, loyalitas pelanggan, pangsa pasar dan hak pemasaran.

Dalam hal pengendalian, entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset dan dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomi tersebut. Manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis. Entitas yang membangun hubungan dengan pelanggan dan membangun loyalitas pelanggan atau entitas yang berhasil menguasai pangsa pasar tertentu. Namun, jika tidak ada hak hukum untuk melindungi atau mengendalikan hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan, maka entitas biasanya tidak memiliki pengendalian yang memadai atas manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hubungan dengan pelanggan tersebut. Walaupun entitas tidak memiliki hak hukum untuk melindungi hubungan pelanggan, namun jika ada transaksi pertukaran hubungan pelanggan nonkontraktual yang sama atau serupa, maka hal ini memberikan bukti bahwa entitas mampu memiliki pengendalian atas manfaat ekonomi masa depan dari hubungan tersebut. Karena transaksi pertukaran tersebut juga membuktikan

bahwa hubungan pelanggan dapat dipisahkan, maka hubungan pelanggan ini memenuhi definisi aset takberwujud.

Manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset takberwujud dapat mencakup pendapatan dari penjualan barang atau jasa, penghematan biaya, atau manfaat lain dari penggunaan aset oleh entitas.

Dalam PSAK 19 paragraf 68 dijelaskan bahwa pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh manfaat ekonomi di masa depan bagi entitas, tetapi tidak ada aset berwujud ataupun aset lain yang diperoleh atau dihasilkan yang dapat diakui. Dalam hal pembelian barang, pengeluaran tersebut diakui sebagai beban pada saat entitas memiliki hak atas barang tersebut. Dalam hal pembelian jasa, pengeluaran tersebut diakui beban ketika entitas menerima jasa tersebut. Contoh lain dari pengeluaran yang diakui sebagai beban pada saat terjadinya adalah:

1. pengeluaran untuk kegiatan perintisan
2. pengeluaran untuk kegiatan pelatihan
3. pengeluaran untuk kegiatan iklan dan promosi
4. pengeluaran dalam rangka relokasi dan reorganisasi sebagian atau seluruh entitas.

### **2.3 Pengungkapan Sukarela**

Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan yang dilakukan perusahaan di luar apa yang diwajibkan oleh standar akuntansi atau peraturan badan pengawas. Pengungkapan sukarela atau diskresioner (*voluntary* atau *discretionary disclosure*) ini merupakan informasi yang dapat disediakan manajemen tetapi

tidak diwajibkan untuk diungkapkan merupakan keleluasaan manajemen untuk mengungkapkannya. Pengungkapan sukarela dapat bersifat keuangan maupun non keuangan.

### **2.3.1 Fungsi atau Tujuan Pengungkapan**

Tujuan pengungkapan adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang mempunyai kepentingan berbeda-beda. Berikut merupakan tujuan dari pengungkapan:

#### **1. Tujuan Melindungi**

Tidak semua pemakai laporan keuangan memiliki kecanggihan sehingga pemakai yang naif perlu dilindungi dengan mengungkapkan informasi yang tidak mungkin diperolehnya atau tidak mungkin mengolah informasi untuk menangkap substansi ekonomik yang melandasi suatu pos statemen keuangan. Pengungkapan ditujukan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka (*unfair*). Dengan tujuan ini, maka tingkat pengungkapan akan menjadi tinggi.

#### **2. Tujuan Informatif**

Pengungkapan diarahkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan pemakai.

#### **3. Tujuan Kebutuhan Khusus**

Tujuan ini merupakan gabungan dari tujuan perlindungan publik dan tujuan informatif.

Manajemen selalu berusaha untuk mengungkapkan informasi privat yang menurut pertimbangannya sangat diminati oleh investor dan pemegang saham khususnya jika informasi tersebut merupakan berita baik (*good news*). Manajemen juga berminat menyampaikan informasi yang dapat meningkatkan kredibilitasnya dan kesuksesan perusahaan meskipun informasi tersebut tidak diwajibkan. Penelitian akademik juga menunjukkan makin besar perusahaan makin banyak pengungkapan sukarela yang disampaikan.

Menurut Belkaoui (2004), elemen-elemen dalam pengungkapan yang sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang diterapkan oleh para pengguna dalam membuat proyeksi dan melakukan penilaian terhadap perusahaan meliputi data keuangan dan nonkeuangan yang memuat mengenai laporan keuangan dan pengungkapan-pengungkapan yang berkaitan, analisis manajemen terhadap data keuangan dan nonkeuangan, dan informasi yang menatap masa depan.

#### **2.4 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori keagenan (*agency theory*) dikembangkan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam Gunardi (2012). Berdasarkan teori yang dikembangkan tersebut, keagenan didefinisikan suatu kontrak kerja sama (*nexus of contract*) yang mana, satu atau lebih *principal* menggunakan orang lain atau yang disebut dengan *agent* untuk menjalankan aktivitas perusahaan. *Principal* sebagai evaluator informasi, sedangkan *agent* sebagai pengambil keputusan. *Agent* akan bertindak dalam menentukan keputusan yang terbaik bagi kepentingan *principal* sedangkan

*principal* akan memberikan *reward* kepada *agent* apabila kepentingannya telah terpenuhi.

Masalah yang muncul antara *principal* dan *agent* jika terdapat perbedaan kepentingan dan berujung pada konflik kepentingan diantara keduanya. Pihak *agent* lebih memahami kondisi internal suatu perusahaan daripada pihak *principal*. Situasi tersebut dapat memicu potensi terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh pihak *agent* untuk memenuhi kepentingan pribadinya. Di sisi lain, pihak *principal* memiliki keterbatasan dalam memperoleh informasi secara rinci mengenai kondisi internal perusahaan dan terbatasnya informasi yang diberikan oleh pihak *agent* melalui laporan keuangan, maka pihak *principal* akan dirugikan apabila pihak *agent* memberikan informasi yang tidak relevan.

Hendriksen dan Van Breda (2002) dalam Jayanti (2014), menyatakan bahwa penyebab adanya perbedaan kepentingan antara manajemen sebagai pihak internal di perusahaan dengan pihak eksternal, dalam hal ini adalah para pengguna laporan keuangan ialah adanya asimetri informasi di dalam laporan keuangan. Sehingga untuk dapat mengurangi asimetri informasi diperlukan sebuah pengungkapan di dalam laporan keuangan.

Keberadaan komite audit ditujukan untuk melindungi kepentingan *stakeholder* atau pihak *principal* melalui tanggung jawab atas informasi yang diperoleh *stakeholder* atau pihak *principal*, sehingga pihak *principal* memperoleh informasi yang relevan melalui pengungkapan atas informasi mengenai *intellectual capital*. Pengungkapan atas informasi *intellectual capital* merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan informasi bagi *stakeholder* atau pihak *principal*

mengenai bagaimana perusahaan menggunakan *intellectual capital* yang dimiliki dalam menjalankan bisnis perusahaan. Melalui pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat tercipta pengendalian terhadap pihak *agent* atau manajemen perusahaan sehingga tindakan *fraud* dapat dicegah.

## 2.5 *Intellectual Capital*

Pengertian *intellectual capital* didefinisikan secara berbeda-beda oleh para peneliti. Menurut Mondal dan Ghosh (2012) dalam Prameswari (2014), *intellectual capital* merupakan tuas untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dan kinerja perusahaan yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Stewart dalam Prameswari (2014), *intellectual capital* didefinisikan sebagai sebuah materi intelektual yang berisi mengenai informasi, pengetahuan, kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan kekayaan.

Secara umum, *intellectual capital* merujuk pada aktiva yang tidak berwujud dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja dan keberhasilan bisnis secara keseluruhan, meskipun perusahaan tidak mencantumkannya secara eksplisit di dalam neraca perusahaan. Namun, jika perusahaan dapat menggunakan *intellectual capital* secara optimal untuk menjalankan strategi perusahaannya dengan efektif dan efisien maka perusahaan dapat mencapai keberhasilan bisnis.

### 2.5.1 **Komponen *Intellectual Capital***

Komponen – komponen dari *intellectual capital* dapat dijadikan dasar untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan dalam rangka membangun daya saing perusahaan. Secara umum, *intellectual capital* terdiri dari tiga komponen:

1. *Human Capital*

Menurut Sawarjuwono (2003), *human capital* adalah *lifeblood* dalam *intellectual capital*. *Human capital* merupakan tempat bersumbernya pengetahuan, keterampilan, kompetensi di dalam perusahaan atau organisasi. Hal ini didasarkan bahwa *human capital* terdapat sumber *innovation* dan *improvement* yang merupakan komponen yang sulit untuk diukur. *Human capital* akan meningkat jika perusahaan atau organisasi mampu untuk menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya.

2. *Relational Capital* atau *Customer Capital*

Menurut Sawarjuwono (2003), *customer capital* merupakan komponen *intellectual capital* yang memberikan nilai secara nyata. Hal ini didasarkan bahwa *customer capital* ialah hubungan yang harmonis atau *association network* yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi dengan para mitranya. Hubungan ini meliputi hubungan yang berasal antara perusahaan atau organisasi dengan pemasok yang andal dan berkualitas, hubungan perusahaan dengan pelanggan yang loyal dan pelanggan yang merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, hubungan perusahaan dengan pemerintah atau dengan masyarakat sekitar. Hubungan ini muncul di luar lingkungan perusahaan yang dapat menambah nilai bagi perusahaan.

### 3. *Structural Capital*

Menurut Sawarjuwono (2003), *structural capital* didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi proses dari rutinitas perusahaan dan strukturnya yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan *intellectual capital* yang optimal serta kinerja bisnis secara keseluruhan, seperti: sistem operasional perusahaan, proses manufakturing, budaya organisasi, filosofi manajemen dan semua bentuk *intellectual property* yang dimiliki oleh perusahaan.

#### 2.5.2 **Intellectual Capital Disclosure**

Sawarjuwono (2003), menyatakan bahwa perubahan lingkungan bisnis saat ini memberikan pengaruh dalam proses pelaporan keuangan perusahaan, terutama dalam hal panyajian dan penilaian atas aset takberwujud. Brinker dalam Sawarjuwono (2003), menjelaskan bahwa seorang Commisionner Steven M.H Wallman memberikan saran bagi perusahaan untuk mulai mengungkapkan *hidden assets* yang dimiliki oleh perusahaan dengan menerbitkan pernyataan tambahan dalam laporan tahunan yang dipublikasikan oleh perusahaan.

Menurut Widjanarko (2006), perusahaan melakukan pengungkapan atas *intellectual capital* karena berbagai alasan, diantaranya adalah:

1. Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu perusahaan dalam merumuskan strategi bisnis. Dengan mengidentifikasi dan mengembangkan *intellectual capital* yang dimiliki, maka perusahaan mendapatkan *competitive advantage*.

2. Pelaporan *intellectual capital* dapat membawa pengembangan indikator – indikator kunci presentasi perusahaan yang akan membantu mengevaluasi hasil – hasil pencapaian strategi.
3. Pelaporan *intellectual capital* dapat membantu mengevaluasi keputusan merger dan akuisisi perusahaan, khususnya dalam menentukan harga yang dibayar oleh perusahaan pengakuisisi.
4. Menggunakan pelaporan *non financial* atas *intellectual capital* yang dapat dihubungkan dengan rencana intensif dan kompensasi perusahaan.
5. Meningkatkan manajemen perusahaan, memenuhi faktor – faktor perundang-undangan dan transaksi. Pengukuran *intellectual capital* yang baik akan melengkapi pengukuran secara *financial*, memberikan *feedback* mekanisme dari tindakan-tindakan, memberikan informasi mengenai pengembangan strategi baru.

## 2.6 Komite Audit

Dewan komisaris saat ini semakin menyadari nilai yang diberikan oleh komite audit sebagai instrumen kontrol dan suatu cara untuk meningkatkan kualitas dari praktik-praktik pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit dapat membantu dewan komisaris dalam masalah – masalah yang berkaitan dengan laporan keuangan dan kontrol atas operasi keuangan. Komite audit juga dapat memperkuat posisi manajemen dengan memberikan keyakinan bahwa seluruh langkah yang mungkin dilakukan telah diambil untuk memberikan penelaahan

independen atas kebijakan keuangan dan operasi manajemen. Hal ini merupakan sesuatu yang baik bagi perusahaan dan bagi masyarakat umum.

Tujuan komite audit adalah untuk membantu dewan komisaris dalam memenuhi tanggung jawab pengawasan atas proses pelaporan keuangan, sistem kontrol internal, proses audit, dan proses perusahaan dalam mengawasi kepatuhan terhadap undang-undang dan peraturan serta kode perilaku. Tanggung jawab komite audit yang berhubungan dengan laporan keuangan meliputi:

1. menelaah masalah – masalah akuntansi dan pelaporan yang signifikan
2. bersama-sama manajemen dan auditor eksternal melakukan penelaahan atas hasil-hasil audit, termasuk kendala yang dihadapi
3. melakukan penelaahan atas laporan keuangan tahunan, dan mempertimbangkan apakah laporan keuangan tahunan telah lengkap, konsisten dengan informasi yang dimiliki oleh anggota komite, dan mencerminkan prinsip-prinsip akuntansi yang tepat
4. melakukan penelaahan atas bagian – bagian dari laporan tahunan dan pelaporan terkait sebelum diterbitkan serta mempertimbangkan keakuratan dan kelengkapan dari informasi yang termuat di dalamnya
5. melakukan penelaahan bersama-sama dengan manajemen dan auditor eksternal terhadap seluruh permasalahan yang perlu dikomunikasikan kepada komite sesuai dengan standar audit yang berlaku umum
6. Mendapatkan pemahaman mengenai bagaimana manajemen mengembangkan informasi keuangan interim, serta sifat dan luas keterlibatan auditor internal dan eksterna di dalamnya

7. Melakukan penelaahan laporan keuangan interim dengan manajemen dan auditor eksternal sebelum disampaikan kepada pihak penyelenggara, serta memastikan apakah laporan keuangan interim telah lengkap dan konsisten dengan informasi yang dimiliki oleh para anggota komite (Sawyer *et al*, 2006).

## **2.7 Efektivitas Komite Audit**

Berdasarkan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, pada pasal 2 menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki Komite Audit. Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan ini diatur beberapa persyaratan Komite Audit yang dalam penelitian ini dijadikan variabel bebas untuk menguji luas informasi pengungkapan atas *intellectual capital* pada perusahaan yang tergolong dalam *high – IC*. Ukuran efektivitas komite audit dapat ditinjau dari beberapa aspek, seperti:

### **2.7.1 Aktivitas Komite Audit**

Dalam penyelenggaraan rapat yang diadakan oleh Komite Audit, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewajibkan Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Rapat Komite Audit memiliki batas minimal jumlah anggota yang hadir, di mana rapat dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota. Keputusan yang diambil pada saat rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setiap kali Komite Audit

mengadakan rapat harus dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris. Selain penyelenggaraan rapat, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawabnya di dalam perusahaan untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses penyampaian laporan keuangan, manajemen risiko, audit, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

### **2.7.2 Jumlah Komite Audit**

Pada pasal 4 peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) nomor 55/PJOK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, Otoritas Jasa Keuangan mensyaratkan keanggotaan Komite Audit paling sedikit terdiri dari tiga orang yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

### **2.7.3 Kompetensi Komite Audit**

Dalam hal keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit, OJK mengatur persyaratan untuk menjadi Komite Audit adalah wajib memiliki paling sedikit satu anggota yang berlatar belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan, wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan sesuai dengan bidang pekerjaannya serta wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten, proses audit, manajemen risiko, peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab yang meliputi melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Emiten kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten. Selain itu, Komite Audit juga memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten serta melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten.

## 2.8 Kelompok Industri

*Global Industry Classification Standart (GICS)* merupakan taksonomi industri yang dikembangkan pada tahun 1999 oleh *Morgan Stanley Capital International (MSCI)* dan *Standard and Poors (S&P)* yang mengelompokkan industri menjadi *low IC intensive industry* dan *high IC intensive industry*. Menurut GICS dalam Wigati (2013), perusahaan yang termasuk dalam *high IC intensive industry* adalah perusahaan yang mampu mengembangkan serta memanfaatkan *intellectual capital* dengan baik sehingga dapat menciptakan keunggulan kompetitif dan nilai tambah bagi perusahaan.

Perusahaan yang dapat memanfaatkan dan mengembangkan *intellectual capital* atau perusahaan yang termasuk dalam *high IC intensive industry* lebih banyak melakukan pengungkapan atas *intellectual capital* jika dibandingkan dengan perusahaan yang termasuk dalam *low IC intensive industry*. Berikut daftar klasifikasi perusahaan *high* dan *low IC intensive industry*:

**Tabel 2.1**  
**Daftar Klasifikasi Perusahaan *High IC Intensive Industry* dan *Low IC Intensive Industry***

<i>High IC Intensive Industry</i>	<i>Low IC Intensive Industry</i>
<i>Automobile and components</i>	<i>Commercial services and supplies</i>
<i>Banks</i>	<i>Consumer durables and apparels</i>
<i>Capital goods</i>	<i>Consumer service</i>
<i>Commercial services and supplies</i>	<i>Energy</i>
<i>Consumer services</i>	<i>Food, beverage and retailing</i>
<i>Diversified financials</i>	<i>Materials</i>
<i>Health care equipment and services</i>	<i>Retail</i>
<i>Insurance</i>	<i>Transportation</i>
<i>Media</i>	<i>Utilities</i>
<i>Pharmaceutical, biotechnology and life science</i>	
<i>Real estate</i>	
<i>Semi conductors and semi conductors equipment</i>	
<i>Software and services</i>	
<i>Technology, hardware, and equipment</i>	
<i>Telecommunication service</i>	

Sumber: GICS dan S&P dalam Woodcock dan Whiting (2009)

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan *intellectual capital* sudah banyak dilakukan baik di Indonesia dan di negara-negara lain. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh White *et al* (2007) mengenai pengaruh ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan saham, dewan komisaris independen, umur perusahaan dan *leverage* terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sampel yang digunakan adalah perusahaan bioteknologi yang terdaftar di bursa Australia yang berjumlah 96 perusahaan pada tahun 2005. Hasil penelitian menunjukkan hanya dewan

komisaris independen, *leverage*, dan ukuran perusahaan memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Li *et al* (2012) mengenai karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran, frekuensi pertemuan, independens, kepemilikan saham, dan keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* dengan menggunakan sampel 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Saham London tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan positif antara ukuran dan frekuensi pertemuan komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Untuk kepemilikan saham komite audit memiliki hubungan negatif dengan pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan variabel independen dan keahlian keuangan komite audit tidak berhubungan dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian mengenai peran komite audit dalam pengungkapan *intellectual capital* juga dilakukan oleh Haji (2015) yang menggunakan sampel perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia tahun 2008 – 2010. Penelitian yang menggunakan variabel independen berupa ukuran, independensi, keahlian keuangan dan jumlah pertemuan komite audit menghasilkan hubungan positif dengan pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian ini juga menganalisis hubungan antar komponen *intellectual capital* yang terdiri dari *internal, external* dan *human capital* terhadap peran komite audit.

Penelitian juga dilakukan oleh Ningsih dan Laksito (2014) mengenai karakteristik komite audit yang terdiri dari ukuran komite audit, jumlah pertemuan anggota komite audit dan jumlah ahli keuangan komite audit terhadap

pengungkapan *intellectual capital*. Penelitian tersebut menghasilkan pengaruh positif antara ukuran dan jumlah pertemuan komite audit dengan pengungkapan *intellectual capital*, sedangkan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit tidak memiliki pengaruh dengan pengungkapan *intellectual capital*.

Penelitian lain mengenai karakteristik komite audit yang meliputi ukuran, independensi, jumlah pertemuan, latar belakang pendidikan, jumlah anggota perempuan, dan keahlian keuangan komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* juga dilakukan oleh Uzilawati *et al* (2014) dengan menggunakan 15 laporan keuangan dari sektor perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2008-2011. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif antara jumlah pertemuan dan jumlah anggota perempuan terhadap pengungkapan *intellectual capital*. Sedangkan variabel lain tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *intellectual capital*.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	White <i>et al</i> (2007)	<i>Drivers of voluntary intellectual capital disclosure in listed biotechnology companies</i>	Perusahaan bioteknologi yang terdaftar di bursa Australia tahun 2005	Variabel dependen: pengungkapan <i>intellectual capital</i> . Variabel independen: ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan saham, dewan	- Ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan <i>leverage</i> memiliki hubungan yang signifikan terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i>

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				komisaris independen, umur perusahaan, dan <i>leverage</i> .	
2	Li et al (2012)	<i>The effect of audit committee characteristics on intellectual capital disclosure</i>	Perusahaan yang terdaftar di bursa saham London tahun 2008	Variabel dependen: pengungkapan <i>intellectual capital</i> Variabel independen: karakteristik komite audit yang terdiri atas ukuran komite audit, frekuensi pertemuan komite audit, independensi komite audit, kepemilikan saham oleh komite audit dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran komite audit dan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i></li> <li>- Kepemilikan saham oleh komite audit memiliki hubungan negatif terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i></li> <li>- Independensi dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit tidak memiliki hubungan dengan pengungkapan <i>intellectual capital</i>.</li> </ul>
3	Haji (2015)	<i>The role of audit committee attributes in intellectual capital disclosures: evidence from Malaysia</i>	Perusahaan yang terdaftar di bursa Malaysia tahun 2008 - 2010	Variabel dependen: Pengungkapan <i>intellectual capital</i> Variabel independen: ukuran komite audit, independensi, keahlian keuangan dan jumlah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ukuran komite audit, independensi komite audit, keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i></li> </ul>

No	Peneliti	Judul	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
				pertemuan komite audit	
4	Ningsih dan Laksito (2014)	Pengaruh karakteristik komite audit terhadap pengungkapan modal intelektual	Perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012	Variabel dependen: pengungkapan modal intelektual Variabel independen : ukuran, jumlah pertemuan, dan keahlian keuangan yang dimiliki oleh komite audit	- Ukuran dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> - Keahlian keuangan yang dimiliki komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i>
5	Uzilawati et al (2014)	<i>The characteristics of audit committee and intellectual capital disclosure in Indonesia banking industry</i>	Sektor perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008 - 2011	Variabel dependen: pengungkapan <i>intellectual capital</i> Variabel independen : ukuran, independensi, jumlah pertemuan, latar belakang pendidikan, jumlah anggota perempuan, dan keahlian keuangan komite audit	- Jumlah pertemuan dan jumlah anggota perempuan berpengaruh positif terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> . - ukuran, independensi, latar belakang pendidikan, dan keahlian keuangan komite audit tidak berpengaruh terhadap pengungkapan <i>intellectual capital</i> .

Penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap pengungkapan *intellectual capital* yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengukur komite audit dengan menggunakan jumlah item dari setiap variabel independen. Penelitian ini mengukur komite audit dengan menggunakan skor dari daftar

pertanyaan yang berasal dari penelitian Hermawan dalam Fransiska(2012) untuk mengukur efektivitas komite audit secara lebih detail sehingga akan menghasilkan keakuratan data. Peneliti menggunakan pengukuran yang dilakukan oleh Hermawan dalam Fransiska (2012) karena penilaian atas komite audit berdasarkan persyaratan dari peraturan OJK nomor 55 tentang pedoman pelaksanaan kerja komite audit, serta berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang sudah dilaksanakan oleh komite audit. Penelitian ini juga akan menganalisis aktivitas komite audit, jumlah komite audit, dan kompetensi komite audit terhadap masing – masing komponen dari *intellectual capital* seperti *human capital*, *structural capital*, dan *relational capital* untuk mendukung hasil pengujian.

## **2.10 Pengembangan Hipotesis**

### **2.10.1. Pengaruh aktivitas komite audit terhadap pengungkapan atas informasi *intellectual capital*.**

Karamanou (2005) menyatakan bahwa komite audit yang lebih sering melakukan aktivitas, baik mengadakan pertemuan maupun melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya akan memiliki lebih banyak waktu untuk melakukan peran dalam memantau proses pelaporan perusahaan secara efektif. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 mengatur bahwa komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit satu kali dalam tiga bulan. Semakin banyak jumlah pertemuan komite audit maka semakin banyak kesempatan komite audit tersebut untuk melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga komite audit dapat

mengevaluasi informasi yang terdapat dalam laporan keuangan, termasuk informasi atas pengungkapan *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan. Pendapat ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2008), yang membuktikan bahwa terdapat hubungan positif antara aktivitas komite audit terhadap luas pengungkapan *intellectual capital*. Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik suatu hipotesis :

H<sub>1</sub>= Aktivitas komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan atas *intellectual capital*

#### **2.10.2. Pengaruh jumlah komite audit terhadap pengungkapan atas informasi *intellectual capital*.**

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015, komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang. Bedard *et al* (2004) berpendapat bahwa semakin besar komite audit, semakin besar kemungkinan untuk mengungkap dan menyelesaikan masalah dalam proses pelaporan keuangan. Jumlah komite audit diidentifikasi sebagai faktor yang potensial dalam mempengaruhi aktivitas komite audit. Efektivitas komite audit muncul dari semakin banyak anggota komite audit maka ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan fungsi dan tugas komite audit semakin besar.

Penelitian Li *et al* (2006) membuktikan bahwa jumlah komite audit adalah faktor yang signifikan dalam menentukan kualitas laporan keuangan. Hal ini dikarenakan komite audit memiliki peran untuk melakukan pengawasan terhadap pengendalian internal yang ada di perusahaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat sudah sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya

termasuk adanya informasi pengungkapan di laporan keuangan seperti pengungkapan atas *intellectual capital*. Sehingga semakin banyak jumlah komite audit, maka semakin baik informasi dalam pengungkapan atas *intellectual capital* yang disajikan perusahaan dalam laporan keuangan. Penjelasan tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Li *et al* (2012) yang membuktikan terdapat hubungan positif antara jumlah komite audit terhadap pengungkapan atas *intellectual capital*. Dari penjelasan diatas dapat ditarik suatu hipotesis:

H<sub>2</sub>= Jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan atas *intellectual capital*

### **2.10.3. Pengaruh kompetensi komite audit terhadap pengungkapan atas informasi *intellectual capital***

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/ POJK.04/2015 mensyaratkan anggota komite audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi dan keuangan, sehingga anggota komite audit harus memiliki kompetensi di bidang akuntansi maupun keuangan. Kompetensi yang dimiliki komite audit akan meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi juga dapat menggali informasi lebih banyak (Levitt, 2000). Komite audit yang memiliki kompetensi cenderung dapat memahami implikasi pasar modal dalam menyediakan informasi termasuk pentingnya melakukan pengungkapan atas *intellectual capital* yang berkualitas. Pemahaman komite audit harus mengarah pada peningkatan pengungkapan atas *intellectual capital* dalam rangka mengkomunikasikan informasi tentang penciptaan nilai perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Haji (2015) membuktikan bahwa terdapat hubungan positif

antara kompetensi yang dimiliki oleh komite audit terhadap informasi atas pengungkapan *intellectual capital* yang dimiliki oleh perusahaan. Dari penjabaran di atas dapat ditarik hipotesis:

H<sub>3</sub>= Kompetensi yang dimiliki oleh komite audit berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan atas *intellectual capital*

